

## **Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) Pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur**

**Suwindra Yudha Pratama<sup>1</sup>**

### **Abstract**

*This study aims to evaluate the application of SIMDA (regional of financial management information system) at the local finance bureau secretariat east Kalimantan province, and to know the constraints and efforts in the implementation of SIMDA. The results showed that, evaluation of the application SIMDA at the local finance bureau secretariat east Kalimantan province have been going well this can be seen from the results achieved after application, because it can be more quickly, accurately and timely. Financial SIMDA also help facilitate the process of preparation of financial statements, employee living record / input data on the system, although there are still some obstacles still to be faced in terms of human resources, infrastructure and technology.*

**Keywords : information system, budget, finance**

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi penerapan SIMDA (sistem informasi manajemen keuangan daerah) pada biro keuangan sekretariat daerah provinsi Kalimantan timur, serta mengetahui kendala dan upaya dalam penerapan SIMDA (sistem informasi manajemen keuangan daerah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIMDA pada biro keuangan sekretariat daerah provinsi Kalimantan timur telah berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat dari hasil yang di capai setelah penerapannya, karena dapat lebih cepat, akurat dan tepat waktu. SIMDA Keuangan juga membantu memudahkan proses penyusunan laporan keuangan, pegawai tinggal mencatat/menginput data pada sistem, meskipun masih ada beberapa kendala yang masih harus dihadapi dari segi sumber daya manusia, infrastuktur dan teknologi.*

**Kata Kunci : Sistem Informasi, Anggaran, Keuangan**

Upaya efisiensi, efektifitas serta produktifitas dalam kegiatan pemerintahan termasuk pelayanan kepada masyarakat dan koordinasi antar lembaga pemerintah memerlukan penerapan teknologi informasi secara optimal dengan menerapkan Sistem Informasi Manajemen. Akses informasi yang cepat, akurat dan aman akan berpengaruh terhadap mekanisme pengambilan keputusan pemerintah dalam pembangunan. Dalam proses transformasi informasi tersebut telah memunculkan tantangan dan hambatan bagi lembaga publik dan birokrasi pemerintah untuk mengambil upaya-upaya pemecahan masalah informasi secara optimal. Sistem informasi manajemen yang menggunakan teknologi pengolahan data elektronik, dengan menggunakan teknologi komputer membuat tingkat efisiensi

---

<sup>1</sup> Penulis adalah Mahasiswa Pasca Sarjana di Insitut Pemerintahan Dalam Negeri, dapat dihubungi melalui email suwindrayudha@gmail.com

pekerjaan akan semakin meningkat. Lebih jauh lagi sistem informasi manajemen dapat mengkomunikasikan seluruh *output* yang dihasilkan dari masing-masing subsistem yang kemudian diintegrasikan menjadi sebuah informasi yang diperlukan bagi manajemen dalam pengambilan keputusan.

Organisasi sektor publik khususnya organisasi pemerintahan merupakan entitas yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangannya kepada publik. Pemerintah adalah sebuah organisasi sektor publik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dan merupakan pendorong serta fasilitator dalam keberhasilan pembangunan termasuk pemerintah daerah (Handayani, 2010:34). Pemerintah beserta pihak-pihak yang terkait, berusaha dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan, dan hal tersebut ditegaskan pada Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan yang menggantikan PP 24 tahun 2005. Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan mengubah basis akutansi menjadi basis akrual guna meningkatkan kualitas informasi akutansi yang terkandung dalam laporan keuangan.

Penerapan Sistem Informasi Akutansi pada pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akutansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah yang mempunyai tujuan yaitu untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan. Saat ini pemerintah mengembangkan suatu program aplikasi komputer yang di beri nama SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah) yang mulai diperkenalkan pada tahun 2006. Program aplikasi tersebut dikembangkan oleh BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) guna membantu pengelolaan Keuangan Daerah baik di tingkat SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) sebagai entitas pelaporan maupun di tingkat SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) entitas akutansi. Adanya program aplikasi ini diharapkan mampu memberikan manfaat lebih kepada Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah, dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan dan penatausahaan APBD dan pertanggungjawaban APBD.

Seiring dengan gema reformasi untuk terwujudnya *good governance* maka Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah yang telah dibangun dapat menyediakan data dan informasi yang akan dimanfaatkan untuk mendukung kecepatan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan kecepatan merespon terhadap tuntutan masyarakat. Sampai dengan Januari 2014, program aplikasi SIMDA telah diimplementasikan di 364 pemda dari 527 pemda atau sebanyak 69,07% ([www.BPKP.go.id](http://www.BPKP.go.id), diakses pada Agustus 2015), terdiri dari:

- ) Implementasi SIMDA Keuangan 300 Pemda
- ) Implementasi SIMDA BMD 273 Pemda
- ) Implementasi SIMDA Gaji 97 Pemda
- ) Implementasi SIMDA Pendapatan 20 Pemda

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan salah satu Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di Provinsi Kalimantan Timur menerapkan SIMDA sebagai sistem informasi manajemen. Terdapat banyak paket aplikasi SIMDA yang diterapkan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur diantaranya adalah SIMDA bidang Keuangan yang membantu dinas mengolah data keuangan serta melaporkan data keuangan ke instansi di atasnya. Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur juga telah menerapkan SIMDA sejak tahun 2007.

Berdasarkan analisis atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah se-Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 dan 2013 menunjukkan adanya kenaikan total Aset pemerintah daerah se-Propinsi Kalimantan Timur sebesar Rp11,712 Trilyun atau 12,85% dibandingkan tahun 2012. Walaupun nilai total kewajiban juga mengalami kenaikan sebesar Rp330,579 Milyar atau sebesar 28,22%. Hal tersebut tidak menghalangi naiknya nilai ekuitas sebesar Rp11,382 Trilyun atau 12,65% dibandingkan tahun 2012. (Sumber:LKPD Provinsi Kaltim).

Dalam penerapan SIMDA yang telah dilaksanakan sejak tahun 2010 di Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur baru mendapatkan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) pada tahun 2012 dan 2014, hal ini mengalami peningkatan dalam kualitas laporan keuangan setelah penerapan aplikasi SIMDA, dimana dapat dilihat bahwa penggunaan aplikasi SIMDA memberikan pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Tujuan penerapan SIMDA Keuangan ini adalah untuk menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangan secara tepat waktu, lengkap, akurat, dan dapat diandalkan sesuai ketentuan yang berlaku serta mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik pada umumnya dan penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah dengan menyediakan sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi pada khususnya.

Dalam pelaksanaan dan penerapan SIMDA di Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, terdapat beberapa kendala yang dihadapi seperti kuantitas dan kualitas SDM yang masih kurang dalam pengelolaan SIMDA, dengan kenaikan aset dan kewajiban ekuitas yang terjadi di pemerintah provinsi Kalimantan Timur, maka semakin kompleks pula masalah dalam proses pengelolaan keuangannya, penerapan SIMDA keuangan yang dilakukan diharapkan mampu mempermudah pelaksanaan dalam proses laporan keuangannya, namun yang terjadi di pemerintah provinsi Kalimantan Timur kenaikan tersebut tidak diiringi dengan perbaikan infrastruktur yang mendukung seperti pembangunan jaringan internet yang lancar tanpa hambatan dan mampu memperlancar pelaksanaan aplikasi SIMDA. Beberapa faktor lain yang masih memerlukan peningkatan dalam rangka mencapai opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) antara lain: kelemahan dalam pengelolaan barang/aset milik daerah, kesesuaian laporan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, masih

lemahnya sistem pengendalian internal pemerintah, dan kompetensi SDM pengelola keuangan daerah masih belum memadai.

Upaya pengawasan dilakukan melalui kegiatan pendampingan dan asistensi kepada pemerintah daerah dan instansi vertikal di daerah. Selama tahun 2014, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan upaya-upaya mencakup penguatan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) dan pendampingan penyusunan LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah), pendampingan pengelolaan keuangan daerah dengan implementasi aplikasi berbasis informasi teknologi yakni SIMDA Keuangan, SIMDA BMD, SIMDA Gaji, SIMDA Pendapatan, dan SIMDA SAKIP, sinergi review atas LKPD dengan Inspektorat Provinsi, dan peningkatan kapasitas SDM APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) daerah. Dalam hal akuntabilitas pengelolaan BUMD/RSUD/BLUD, telah dilakukan pendampingan penyusunan Laporan Keuangan SAK-ETAP (Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik).

(Sumber:www.bpkp.go.id, diakses pada Juli 2015)

### **Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA)**

Menurut Kumorotomo (2004:7) sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang diciptakan untuk melaksanakan pengolahan data yang akan dimanfaatkan oleh suatu organisasi. Lebih lanjut Kumorotomo (2004: 9) menjelaskan bahwa unsur-unsur yang mewakili suatu sistem informasi secara umum adalah masukan (*input*), pengolahan (*processing*), dan keluaran (*output*).

Dalam era keterbukaan informasi saat ini, pemerintah harus menyesuaikan keinginan masyarakat yang menginginkan adanya transparansi dan kecepatan dalam pemberian pelayanan public, hal ini yang tidak dapat diabaikan dalam pelayanan publik adalah konsep *networking governance* menurut Wayne R. Leach dalam (Hatifah, 2003 : 47 ) antara lain :

1. *Government to Citizen* (G2C) adalah suatu teknologi informasi yang mempunyai tujuan untuk memperbaiki hubungan interaksi antara pemerintah dengan masyarakat.
2. *Government to Business* (G2B) adalah suatu tipe hubungan pemerintah dengan bisnis.
3. *Government to Government* (G2G) adalah berupa web pemerintah yang dibuat.
4. *Government to Employees* (G2E) adalah berupa tipe hubungan yang ditujukan untuk para pegawai pemerintahan atau pegawai negeri untuk meningkatkan kinerja.

Informasi dikatakan bernilai apabila dapat memberikan manfaat kepada para pengguna. Adapun manfaat dari informasi itu sendiri menurut Sutanta (2003:11) adalah :

1. Menambah pengetahuan.
2. Mengurangi ketidakpastian pemakai informasi.
3. Mengurangi risiko kegagalan.

4. Mengurangi keanekaragaman yang tidak diperlukan.
5. Memberikan standar, aturan, ukuran dan keputusan untuk menentukan pencapaian, sasaran berdasarkan informasi yang diperoleh.

Aplikasi sistem informasi manajemen daerah merupakan program aplikasi komputer yang terintegrasi dan dapat membantu proses administrasi pemerintah daerah dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, sampai tingkat kecamatan dan kelurahan. SIMDA terdiri dari 26 aplikasi terpisah yang dapat didistribusikan di setiap SKPD dengan sistem database terintegrasi, sehingga outputnya dapat dipergunakan oleh pimpinan daerah untuk membantu proses pengambilan keputusan. Di sisi lain pihak legislatif dapat menggunakannya untuk melakukan monitoring terhadap kinerja pemerintah daerah. Salah satu aplikasi SIMDA adalah SIMDA keuangan yang merupakan suatu program aplikasi yang ditujukan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Dengan aplikasi ini, pemda dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, dimulai dari penganggaran, penatausahaan hingga akuntansi dan pelaporannya.

### **Tujuan dan Manfaat SIMDA Keuangan**

Pada hakikatnya penerapan SIMDA itu sendiri memiliki tujuan untuk dapat mempermudah kinerja para pegawai dalam melakukan penyusunan Laporan keuangan dan data keuangan, sehingga mampu memberikan efektifitas dan efisiensi. Tujuan diterapkannya aplikasi SIMDA ([www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id), diakses pada Juli 2015) adalah :

1. Sebagai tempat tukar menukar informasi bagi setiap unit kerja sama penerima koneksitas jaringan SIMDA;
2. Sebagai alat komunikasi langsung dengan menggunakan webcam bagi unit kerja penerima koneksitas jaringan SIMDA;
3. Sebagai salah satu media kontrol bagi realisasi kegiatan, baik capaian fisik maupun penyerapan dananya;
4. Sebagai media awal bagi pelaksanaan e-government; dan
5. Sebagai sarana untuk pelaksanaan good government. Manfaat yang diperoleh oleh pemerintah daerah dengan menggunakan sistem aplikasi SIMDA keuangan daerah terintegrasi adalah sebagai berikut :
  - a. Database terpadu, tidak perlu input berulang-ulang data yang sama;
  - b. Data yang sama akan tercek dan recek secara otomatis (validasi data terjamin); dan
  - c. Fleksibel, dapat menghasilkan informasi sesuai dengan kebutuhan dimana:

*Output* dapat disesuaikan menurut perundang-undangan yang berlaku, dan *output* dapat disajikan berdasarkan kebutuhan manajemen pemerintah daerah untuk mengambil keputusan/kebijakan.

### **Klasifikasi SIMDA**

Program SIMDA sendiri terdiri dari beberapa tingkatan yang di dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi aplikasi dalam memberikan informasi kepada masing-masing pejabat yang bersangkutan. SIMDA dapat diklasifikasikan dalam tiga tingkatan, yaitu :

1. Sistem informasi eksekutif sebagai pendukung pimpinan daerah dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan;
2. Sistem informasi fungsional bagi para pimpinan dinas/badan/lembaga sebagai pendukung informasi strategis pimpinan daerah; dan
3. Sistem informasi operasional sebagai penunjang tugas pokok masing-masing dinas/lembaga.

### **Unsur SIMDA**

Aplikasi SIMDA dibentuk secara terstruktur dan kompleks sehingga saling berhubungan antara satu dan lain yang membentuk jaringan, adapun keterkaitan antar jaringan tersebut sangat penting sehingga apabila satu jaringan tersebut tidak berfungsi dengan baik maka akan mempengaruhi jaringan yang lainnya.

Kerangka arsitektur SIMDA terdiri dari empat lapis struktur (www.bpkp.go.id, diakses pada Juli 2015), yaitu:

1. Akses, jaringan telekomunikasi, jaringan internet, dan media komunikasi, lainnya yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengakses situs pelayanan publik;
2. Portal, pelayanan publik, situs web pemerintah pada internet penyedia layanan publik tertentu yang mengintegrasikan proses pengolahan dan pengelolaan informasi dan dokumen elektronik di sejumlah instansi yang terkait;
3. Organisasi pengolahan dan pengelolaan informasi organisasi pendukung yang mengelola, menyediakan dan mengolah transaksi informasi dan dokumen elektronik; dan
4. Infrastruktur dan aplikasi dasar semua prasarana, baik berbentuk perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan, pengolahan, transaksi, dan penyaluran informasi.

### **Fungsi Program Aplikasi SIMDA Keuangan**

Fungsi utama pengimplementasian SIMDA Keuangan adalah :

1. Membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah (penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban);
2. Menyusun laporan keuangan lebih efisien dan akurat;
3. Menyimpan data keuangan untuk keperluan manajemen lainnya;
4. Menyajikan informasi yang akurat secara efektif dan efisien yang akan digunakan oleh pengguna laporan; dan
5. Mempermudah proses audit bagi Auditor dengan merubah tata cara audit manual menjadi Electronic Data Processing (EDP) audit.

Adapun Output yang dihasilkan dari SIMDA Keuangan adalah :

1. Penganggaran

- a. Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); dan
- c. Surat Penyediaan Dana (SPD);
- 2. Penatausahaan
  - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
  - b. Surat Perintah Membayar (SPM);
  - c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
  - d. Surat Tanda Setoran (STS);
  - e. Register; dan
  - f. Surat pengendalian lainnya.
- 3. Akuntansi dan Pelaporan
  - a. Jurnal;
  - b. Buku besar;
  - c. Buku pembantu;
  - d. Laporan realisasi anggaran;
  - e. Laporan arus kas; dan
  - f. Neraca.

### **Keunggulan dan Manfaat SIMDA Keuangan**

Keunggulan atau nilai tambah yang ditawarkan oleh SIMDA Keuangan adalah:

1. *Output*/Laporan disesuaikan peraturan yang berlaku dan fleksibel, dapat menghasilkan informasi sesuai dengan kebutuhan;
2. Berbasis windows;
3. Validasi Inputan data lebih terjamin;
4. Terdapat menu otoritas dan unit otoritas;
5. Memfasilitasi setiap fungsi pengelolaan keuangan daerah dengan melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sekaligus melakukan pencatatan akuntansi; dan
6. Memfasilitasi akuntansi pengguna anggaran.

Selain manfaat di bidang pengelolaan keuangan daerah, berikut adalah manfaat lain yang terintegrasi dalam pemanfaatan SIMDA, diantaranya:

#### **1. Sesuai Peraturan**

Dengan menerapkan aplikasi SIMDA Keuangan sebagai sebuah sistem informasi pengelolaan keuangan, pemerintah daerah secara otomatis telah melaksanakan pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan pengelolaan keuangan daerah karena aplikasi SIMDA Keuangan dikembangkan atas dasar kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

#### **2. Kesiambungan *Maintenance***

Dengan lokasi BPKP yang ada di setiap ibukota propinsi, maka pemeliharaan sistem dapat dilakukan secara berkesinambungan dan optimal.

#### **3. *Transfer of Knowledge***

Poin yang paling penting dari penerapan sistem ini adalah adanya transfer pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan daerah bagi aparat daerah

setempat, tidak hanya masalah operasional sistem saja. Selain itu, proses asistensi yang dilaksanakan oleh BPKP dalam kaitannya dengan penerapan aplikasi SIMDA di suatu daerah diorientasikan satu kali untuk selamanya.

4. Terintegrasi

SIMDA merupakan program aplikasi keuangan daerah yang telah mengintegrasikan empat tahapan penyelenggaraan keuangan daerah yaitu, penganggaran, perubahan anggaran, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban. SIMDA juga mengintegrasikan antara proses transaksi keuangan yang terjadi dengan proses penjurnalannya secara otomatis. Sehingga, setiap transaksi keuangan yang terjadi, dapat langsung dilihat jurnal atas transaksi tersebut hingga pelaporannya pada waktu yang bersamaan.

**Keuangan Daerah dan Laporan Keuangan Daerah**

Dalam arti sempit, keuangan daerah yakni terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan APBD. Oleh sebab itu keuangan daerah identik dengan APBD. Menurut Mamesah dalam Halim (2004: 18), Keuangan Daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang. Demikian pula dengan segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kewajiban daerah tersebut perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah.. Menurut Halim (2004: 20), ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk dalam keuangan yang dikelola langsung adalah APBD dan barang-barang inventaris milik daerah. Sedangkan keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam ketentuan umum pada PP Nomor 58 Tahun 2005, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pengawasan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini mengandung beberapa kepengurusan dimana kepengurusan umum atau yang sering disebut pengurusan administrasi dan kepengurusan khusus atau juga sering disebut pengurusan bendaharwan. Dalam pengelolaan anggaran/keuangan daerah harus mengikuti prinsip-prinsip pokok anggaran sektor publik. Pada Permendagri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2007 menyatakan bahwa "APBD harus disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip pokok anggaran sektor publik, sebagai berikut: (a) Partisipasi Masyarakat, (b) Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran, (c) Disiplin Anggaran, (d) Keadilan Anggaran, (e) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran dan (f) Taat Asas.



Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (PP 58/2005, pasal 1).

Halim Abdul (2007:47) menyatakan bahwa Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Pengertian ini tidak berbeda jauh dengan pengertian sebagaimana dijelaskan dalam Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah di mana dalam peraturan tersebut dijelaskan pengertian Keuangan daerah sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut.

Untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas maka penggunaan sistem informasi manajemen sangat diperlukan untuk mengurangi ketidaktepatan dan tingkat kesalahan dalam penyusunan laporan. Salah satu misi dalam penerapan SIMDA ialah meningkatkan kinerja pengelola keuangan di tiap-tiap SKPD dan menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, bebas dari segala tindakan yang menjurus ke arah kolusi korupsi dan nepotisme.

Dalam PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normative yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan persyaratan normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

1) Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

2) Andal

Informasi dari laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

3) Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang

sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun.

4) Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

### **Evaluasi Penerapan SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah) pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur**

#### **Manfaat (*Utility*)**

Program aplikasi komputer SIMDA keuangan adalah suatu program aplikasi yang ditujukan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerahnya. Dengan aplikasi ini, pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah secara terintegrasi, dimulai dari penganggaran, penatausahaan hingga akuntansi dan pelaporannya.

Pengelolaan Sistem Informasi memiliki asas keterbukaan dan mampu memberikan informasi secara cepat, sehingga dapat berguna bagi masyarakat, dan para *stake holder*.

Ciri utama SIMDA Keuangan adalah sistem komputerisasi yang dirancang untuk membantu proses pengolahan data keuangan pada pemerintah daerah. Secara umum pelaksanaan SIMDA Keuangan di Biro Keuangan telah membantu proses pengolahan data keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan provinsi Kalimantan Timur

#### **Akurat (*Accuracy*)**

Evaluasi terhadap penerapan SIMDA Keuangan dilakukan dengan membandingkan waktu standar dan waktu faktual setiap proses penyelesaian satu produk SIMDA Keuangan. Waktu standar adalah waktu penyelesaian output standar berdasarkan peraturan yang telah digariskan pemerintah, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sedangkan waktu faktual adalah waktu penyelesaian output rata-rata yang biasa dihasilkan dalam penerapan SIMDA Keuangan.

Berikut ini dapat dilihat perbandingan waktu standar dan waktu penyelesaian secara faktual setelah penggunaan SIMDA

Tabel  
Perbandingan Waktu Standar Penerapan Dan Penyelesaian Secara Faktual

No	Output	Waktu standar (hari)	Waktu faktual (hari)
1	Aspek penganggaran	7	3

2	Aspek Penatausahaan	2	1
3	Aspek Akuntansi dan Pelaporan	6 bulan setelah Tahun Anggaran berakhir	9-15

Sumber : PP 59 Tahun 2007 dan Hasil Pengolahan data primer dari Biro Keuangan

Dari tabel diatas dapat memberikan gambaran bahwa perbandingan waktu standar yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah saat dilakukan secara manual dan dilakukan dengan menggunakan SIMDA Keuangan, dari hal tersebut dapat terlihat jelas bahwa penerapan menggunakan SIMDA Keuangan mampu mempersingkat waktu yang lebih signifikan dari waktu standar yang ditetapkan apabila proses pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara manual. Namun yang masih menjadi masalah adalah terkadang masih terlambatnya setiap SKPD untuk memberikan laporan kepada Biro Keuangan sehingga proses pengumpulan data sering terhambat.

SIMDA keuangan bekerja secara terintegrasi yang terbagi ke dalam 3 bagian yaitu, bagian anggaran, Penatausahaan, akuntansi dan pelaporan. Setiap bagian bertanggungjawab atas tugasnya masing-masing, bagian anggaran bertanggungjawab untuk menyusun rencana kerja anggaran (RKA), dokumen pelaksana anggaran (DPA), serta surat penyedia dana (SPD). Bagian penatausahaan bertanggungjawab untuk menyusun surat perintah pembayaran (SPP), surat perintah membayar (SPM), surat perintah pencairan dana (SP2D) serta surat surat lainnya, sedangkan bagian akuntansi bertanggungjawab untuk menyusun laporan keuangan.

Laporan-laporan tersebut diproses secara otomatis dengan menggunakan SIMDA keuangan, setiap pegawai yang bertanggungjawab menyusun laporan hanya bertugas menginput data ke dalam sistem dan secara otomatis akan terolah sendiri sampai menghasilkan output yang diinginkan. Hal tersebut memudahkan tanggungjawab yang harus dikerjakan oleh para pegawai.

### **Layak (*Feasibility*)**

Suatu Pengolahan data keuangan berbasis pengolahan data elektronik memerlukan suatu pengendalian Intern yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa sistem yang telah dirancang Bisa mencapai efisiensi dan efektifitas pengelolaan dan pelaporan keuangan.

Terdapat beberapa jenis pengendalian intern yang diterapkan dalam pengelolaan data keuangan melalui aplikasi SIMDA Keuangan yang pertama adalah pengendalian akses dan wewenang *user*, hal ini memungkinkan pembatasan akses aplikasi SIMDA Keuangan yang ditujukan Hanya kepada pihak tertentu seperti operator SIMDA Keuangan. Para operator yang merupakan bendahara Pengeluaran pembantu setiap bidang dibekali *account* akses dan password sendiri.

Pengendalian wewenang user dilakukan dengan pembagian tingkat kewenangan, meliputi: administrator, supervisor, dan operator. Administrator memiliki kewenangan pembuatan user dan otoritas *user*, *setting* aplikasi, posting anggaran, dan *unposting* jurnal. Supervisor memiliki kewenangan mengotorisasi input data, maupun penyesuaian/koreksi. Operator hanya memiliki kewenangan untuk menginput data dan melihat laporan.

Yang kedua adalah pengendalian keamanan umum, hal ini dilakukan secara fisik (pemeliharaan *peripheral/hardware*) dengan membekali UPS pada setiap unit komputer server sebagai pengaman daya. Dalam hal pengamanan data, terdapat kebijakan larangan mengcopy data lewat media *flashdrive* agar komputer server tercegah dari penyebaran virus. Sedangkan untukantisipasi hilangnya data server selalu mengirimkan data backup ke server Biro Keuangan Setda.

Yang ketiga adalah pengendalian menu berdasarkan fungsi untuk menjamin validitas input data aplikasi SIMDA Keuangan secara terintegrasi, maka diterapkan pengendalian berdasarkan fungsi-fungsi: penganggaran, pengendalian dilakukan dengan adanya jejak rekam (*log*) *user* pelaksana posting anggaran di tiap-tiap SKPD dan SKPKD; penatausahaan, pengendalian dilakukan dengan adanya peringatan apabila saldo sisa SPD (Surat Penyediaan Dana) tidak mencukupi untuk pengajuan SPP (Surat Pengajuan Pembayaran) ataupun untuk kegiatan yang sama dan belum dipertanggungjawabkan dan pembukuan, penatausahaan, validasi terhadap dokumen SPM (Surat Perintah Pembayaran) dilakukan oleh pejabat yang berwenang dengan menetapkan status draft, final atau batal.

### **Kendala-kendala yang dihadapi dalam Penerapan SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah ) pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur**

Dalam penerapannya, SIMDA di Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, karena terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya sehingga menyebabkan penerapan aplikasi SIMDA Keuangan tidak berjalan dengan optimal.

Adapun menurut BPKP ada beberapa faktor-faktor penghambat yang selama ini masih menjadi masalah dalam penerapan SIMDA di berbagai daerah di Indonesia diantaranya yaitu :

#### ***Sumber Daya Manusia***

Sumber Daya Manusia adalah salah satu faktor penting yang menjadi dasar keberhasilannya penerapan SIMDA sehingga kualitas dan kuantitas dari Sumber Daya Manusia itu sendiri juga menjadi faktor penting yang harus diperhatikan. Saat ini penerapan SIMDA di Biro Keuangan terdapat tim yang melakukan pengelolaan SIMDA tersebut.

Tabel  
Tingkat Pendidikan Tim Pelaksana SIMDA

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SMA	6
2	D3	2
3	S1	7
4	S2	3

Sumber : Biro Keuangan Sekretariat Daerah Prov. Kaltim

Tabel di atas menggambarkan bahwa tingkat pendidikan dari tim pelaksana SIMDA Keuangan masih banyak di dominasi oleh lulusan SMA dan S1, dan dari lulusan sarjana tersebut hanya sedikit yang memang memiliki latar belakang jurusan komputer, sedangkan jurusan diploma memang teknisi komputer yang hanya berjumlah 2 orang. Jika dilihat dari komposisi tersebut maka memang tim pelaksana SIMDA tersebut masih kurang untuk penerapan SIMDA yang ada di Biro keuangan setda prov. Kaltim. Sehingga harus di lakukan perekrutan yang lebih sesuai lagi dengan disesuaikan jumlah kebutuhannya dan tingkat pendidikan yang linier dengan program yang berbasis komputer tersebut.

### ***Teknologi***

Dukungan terhadap penerapan SIMDA keuangan juga akan berjalan lancar apabila didukung dengan teknologi yang memadai, karena dalam penerapan SIMDA ini sendiri terkadang masih muncul permasalahan teknis yang sering terjadi selain *human eror* itu sendiri, masalah teknis itu meski kecil tetapi masih tetap harus dilakukan antisipasi, antisipasi yang paling pertama di lakukan adalah mengetahui jenis masalah teknis yang sering muncul.

### ***Infrastruktur***

Infrastruktur yang memadai merupakan komponen yang penting dalam penerapan program SIMDA, sehingga infrastruktur tersebut harus sangat memadai agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar. Kurangnya infrastruktur yang menunjang dalam penerapan SIMDA Keuangan di Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel  
Jumlah Inventaris Barang Penunjang SIMDA

No	Jenis barang	Jumlah
1	Komputer dan laptop	45
2	Server	2
3	Jaringan LAN	4
4	UPS	5
5	Wifi	2

Sumber: Biro Keuangan Setda Prov. Kaltim

Jika dilihat dari tabel diatas jumlah komputer dan laptop memang cukup bagi pegawai akan tetapi jumlah komputer dan laptop yang *support* untuk menjalankan program aplikasi SIMDA Keuangan hanyalah sebagian kecil saja, sedangkan jumlah wifi yang ada hanyalah 2, itupun bukan jaringan wifi yang langsung terpasang di jaringan kantor melainkan jaringan *wifi portable*.

#### **Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala Penerapan SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah ) pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur**

Dalam penerapan SIMDA Keuangan ada beberapa upaya yang harus dilakukan agar penerapannya berjalan lancar, seperti apa yang tercantum dalam strategi penerapan basis akrual secara penuh di Indonesia yaitu di antaranya :

##### **1. *Necessary Condition* (kondisi yang di perlukan)**

###### **a. Komitmen**

Komitmen dari para pemimpin mengenai sistem akuntansi berbasis akrual sudah dibangun semenjak adanya peraturan pemerintah muncul. Dengan adanya sistem akuntansi berbasis akrual maka diharapkan mampu menghasilkan laporan keuangan daerah yang lebih riil dan sesuai dengan input maupun outputnya. Oleh karena itu dengan adanya aplikasi SIMDA Keuangan dapat membantu pengelolaan keuangan berbasis akrual lebih mudah karena system SIMDA keuangan yang terintegrasi secara langsung dan bersifat *online* mampu memudahkan pengawasannya.

###### **b. Kapasitas SDM**

Masa awal penerapan akuntansi basis akrual pemerintahan memerlukan SDM yang menguasai akuntansi pemerintahan, maka pemerintah perlu secara serius menyusun perencanaan SDM dibidang akuntansi pemerintahan.

Sumber Daya Manusia yang ada di Biro Keuangan memiliki beberapa kekurangan diantaranya dari segi jumlah dan kemampuan yang mampu memahami dalam penerapan SIMDA keuangan masih sedikit, hal tersebut di tunjukan dari rata-rata latar belakang pendidikan para pengelola SIMDA keuangan yang tidak memiliki latar belakang tentang IT dan akuntansi. Secara tidak langsung yang tidak memiliki kompetensi tersebut baru mendapatkan pengetahuan mengenai SIMDA Keuangan setelah mengikuti beberapa pelatihan yang di adakan Biro Keuangan.

c. Dana pemeliharaan

Dana pemeliharaan yang dianggarkan oleh Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk pemeliharaan yaitu hanya sebesar 800 juta rupiah. Dana pemeliharaan yang dianggarkan oleh Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur antara lain pemeliharaan dokumen-dokumen yang terkait, pemeliharaan peralatan kantor, pemeliharaan komputer baik aplikasi atau sistem pemeliharaan jaringan internet.

Dilihat dari kondisi yang ada dan realisasi anggaran selama ini di Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, bahwa anggaran yang ada masih kurang, hal tersebut juga mnganggu upaya-upaya yang dilakukan oleh Biro Keuangan dalam melakukan upaya untuk meningkatkan kinerja dan infrastruktur yang menjadi penunjang dalam penerapan SIMDA Keuangan.

2. *Sufficient Condition* ( Kondisi yang cukup)

a. Prosedur :

Sistem dan prosedur yang menjelaskan teknik-teknik pencatatan, penyiapan dokumen, sampai dengan basis akrual penuh. Dengan menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan, Sistem dan prosedur seperti sistem penganggaran, sistem penatausahaan, dan sistem akuntansi dan pelaporan dapat mempermudah kinerja para pegawai dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah sehingga Biro keuangan menerapkan program tersebut dengan harapan mampu menghasilkan hasil laporan keuangan Daerah yang sesuai dengan standar akuntansi Negara.

b. Teknologi :

Aplikasi penatausahaan dan akuntansi yang mengakomodasi basis akrual di dalamnya agar penerapan basis akrual ini dapat sesuai harapan. Dengan penerapan aplikasi SIMDA di seluruh SKPD yang teritegrasi langsung dengan Biro Keuangan mampu memberikan kemudahan serta kecepatan dan ketepatan dalam melakukan pelaporan Keuangan, penerapan teknologi aplikasi SIMDA dijalankan oleh tim yang di bentuk khusus untuk melakukan penerapannya yaitu tim pengelola SIMDA.

Meskipun dalam penerapan teknologi tersebut masih terkendala dengan masalah teknis seperti jaringan internet yang kadang masih terhambat tetapi biro keuangan mencoba melakukan upaya peningkatannya dengan menyediakan wifi tersendiri meskipun jaringan

wifi portable yang dimiliki hanya mampu menjangkau perangkat secara terbatas. Jaringan internet yang masih belum memadai ini diharapkan segera ditingkatkan lagi oleh Biro Keuangan agar mampu memberikan hasil Penerapan SIMDA lebih baik lagi. Selain itu juga melakukan antisipasi yang baik terhadap segala bentuk kegagalan terhadap sistem yang dapat mengakibatkan tertundanya proses pengolahan data keuangan seperti pengadaan cadangan server.

### **Kesimpulan Dan Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan dapat diambil kesimpulan secara garis besar Penerapan SIMDA Keuangan di Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat dari hasil yang di capai setelah penerapannya, karena dapat lebih cepat, akurat dan tepat waktu. SIMDA Keuangan juga membantu memudahkan proses penyusunan laporan keuangan, pegawai tinggal mencatat/menginput data pada sistem. SIMDA Keuangan terbagi atas tiga bagian, yaitu bagian penatausahaan, bagian penganggaran, bagian akuntansi dan pelaporan. Dimana setiap bagian bekerja secara terintegrasi dan saling berhubungan satu sama lainnya. Kendala yang dihadapi dalam penerapan SIMDA di Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yaitu ada beberapa aspek diantaranya dari segi SDM ( Sumber Daya Manusia ) yang masih terdapat beberapa kekurangan dari segi kuantitas dan juga kualitas, masih kurangnya pengetahuan mengenai SIMDA, yaitu kurangnya tenaga ahli IT dan pelaksana SIMDA yang berlatar belakang akuntansi. Dari Segi infrastruktur terdapat kekurangan dari jumlah komputer atau laptop dan jaringan internet yang masih terbatas. Upaya yang dilakukan Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yaitu memberikan beberapa pelatihan mengenai penerapan SIMDA yang ditujukan untuk para pelaksana SIMDA, tidak hanya yang ada di biro keuangan saja, akan tetapi pelatihan tersebut di tujukan bagi seluruh pelaksana SIMDA di setiap SKPD.

Adapun saran yang dalam penelitian ini antara lain :

1. Semakin mengintensifkan koordinasi dan komunikasi antar pengelola SIMDA tidak hanya di Biro Keuangan tetapi di seluruh SKPD yang menerapkan SIMDA Keuangan di Provinsi Kalimantan Timur.
2. Melakukan penempatan pegawai untuk tupoksi bidang keuangan yang sesuai dengan spesifikasi kemampuannya, serta menambah jumlah administrator dan operator yang bertugas sebagai pelaksana SIMDA di Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Menerapkan sistem reward dan punishment khusus untuk pegawai yang mengelola SIMDA
4. Penyempurnaan layout jaringan internet perlu terus dilakukan, sebagai upaya penemuan layout jaringan yang mendukung perubahan dan peningkatan teknologi sistem informasi.

### **Daftar Pustaka**



- Anonymous, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 – 2013.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akutansi Pemerintahan.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2010 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan APBD.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 2013 Penerapan Standar Akutansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintahan Daerah.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Abdul, Halim. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Edhy, Sutanta. 2003. *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Handayani, R. 2010. "Analisis Faktor-Faktor yang Menentukan Efektivitas Sistem Informasi pada Organisasi Sektor Publik". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Jakarta: Gramedia. Jakarta.
- Hatifah, SJ Sumarto. 2003. *Inovasi, Partisipasi Dan Good Governance*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kumorotomo, Wahyudi. 2001. *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: Radja Grafindo Persada.